

## PATRIOTISME MASYARAKAT PONOROGO MENURUT PENUTURAN *BABAD PONOROGO*

*Ahmad Choirul Rofiq*  
*Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo*  
*Email: rofiq8377@yahoo.co.id*

**Abstract:** *Purwowijoyo or Sukatman Purwosuwito (11 April 1914 - March 20, 1994) idealism is to provide the greatest profit for civil through historiography of the local history of Ponorogo and his idealism was written in Babad Ponorogo. Theoretically, history method had been conducted in his historiography. Futhermore, Babad Ponorogo comprises 8 volumes. In Babad Ponorogo, it told about various patriotic events in Ponorogo society gaining imperialism for instance Raden Martopuro in 1853 and Kampak Patik in 1885). Then to commemorate that events, public services was developed by Bathoro Katong government. It was complicated reasons in fighting Dutch because of the political situation of foreign imperialism adverse social and economic. Ponorogo government had priority in determining the development. On the other hand, its government was enforced by colonial. All regulations were assigned by invaders. And after Independence Day, Central Government instructs all Ponorogo programs in developing their region.*

**المخلص:** الدعم من فورواويجايا و سوكتمان فورواسوسيتا (11 من أبريل – 20 مارس 1994) في كتابة باباد فونوروجو هو فكرتهما لأغراض الإفادة إلى جميع المجتمع بوسيلة كتابة التاريخ المحلي الذي يتعلق بتاريخ فونوروجو. ويتكون كتاب باباد فونوروجو على ثمانية أجزاء. استخدم فورواويجايا منهجا تاريخيا في كتابة هذا التاريخ. وتكتب في باباد فونوروجو الظواهر الوطنية من مجتمع فونوروجو بأنهم يقاثلون المستعمرين (كما ماثله سيد مارتوفورا سنة 1853 وسيد كفاك فوتيه سنة 1885) ثم استمرّ بناء في مجالات شتى تحت رعاية باتورو كاتوع. وكانت خلفيات التعارض من مجتمع فونوروجو على المستعمرين من هولندا متعددة حسب ما وقعت حالة سياسة الاستعمار التي أصابت على الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وقبل مجيء المستعمرين كان اتجاه بناء حكومة فونوروجو حرية حسب الحاجة ولكن بعد الاستعمار أصبح اتجاه بناء الحكومة أن تتبع بنظام كتبه المستعمر. وأما بعد الاستقلال فكان اتجاه بناء الحكومة تحت البرنامج من الحكومة الإندونيسية.

**Abstrak:** Motivasi Purwowijoyo atau Sukatman Purwosuwito (11 April 1914 - 20 Maret 1994) dalam penulisan *Babad Ponorogo* adalah idealismenya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, melalui historiografi sejarah lokal yang berkaitan dengan sejarah Ponorogo. *Babad Ponorogo* terdiri

8 jilid. Secara teoritis, Purwowijoyo telah menerapkan metode historis dalam historiografinya. Berdasarkan *Babad Ponorogo*, tercatat berbagai peristiwa patriotik masyarakat Ponorogo yang diwujudkan dengan perlawanan terhadap penjajahan bangsa lain (sebagaimana diteladankan Raden Martopuro pada 1853 dan Kampak Patik pada 1885) serta direalisasikan melalui pembangunan di berbagai bidang sejak pemerintahan Bathoro Katong. Perlawanan masyarakat Ponorogo terhadap pemerintah kolonial Belanda bersifat multikausal karena dilatarbelakangi oleh situasi politik penjajahan bangsa asing yang merugikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Ponorogo. Sebelum adanya penjajah, pemerintah Kabupaten Ponorogo mempunyai kebebasan dalam menentukan arah pembangunan. Namun ketika berada di bawah cengkeraman penjajah, pemerintah Kabupaten Ponorogo dipaksa mengikuti segala peraturan yang ditetapkan penjajah. Adapun pada masa setelah kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Ponorogo melaksanakan pembangunan dengan arahan disesuaikan dengan program-program pemerintah pusat.

**Kata Kunci:** Purwowijoyo, *Babad Ponorogo*, Masyarakat Ponorogo, Patriotisme

## PENDAHULUAN

Pada bulan Januari 2016, masyarakat Indonesia digemparkan berita mengenai adanya sebagian dari anggota keluarganya yang pergi meninggalkan keluarganya tanpa memberitahukan tujuan sebenarnya. Masyarakat kemudian dikejutkan oleh Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar yang ternyata telah mempunyai banyak pengikut dan membentuk pemukiman tersendiri yang sangat eksklusif bagi mereka, tepatnya di Moton Panjang, Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Pemerintah memandang kelompok Gafatar sebagai ancaman serius bagi negara karena kelompok ini disinyalir akan mendirikan negara baru. Pemerintah kemudian memulangkan seluruh eks Gafatar ke daerahnya masing-masing.

Selain berita mengenai Gafatar, terdapat juga berita menyedihkan tentang tragedi serangan teroris di bulan Januari 2016 di Jakarta. Peristiwa-peristiwa serupa juga pernah mengguncang bumi Indonesia. Misalnya, sebagian besar teror-teror terhadap negara Indonesia tersebut dilakukan oleh orang-orang yang secara formal berkewarganegaraan Indonesia. Para korban yang menderita, baik meninggal maupun luka-luka juga mayoritas warga

Indonesia. Selain korban jiwa, teror-teror itu telah memporak-porandakan gedung-gedung dan sarana prasarana di Indonesia.<sup>1</sup>

Fenomena Gafatar dan terorisme yang dilakukan oleh warga Indonesia tersebut menunjukkan bahwa kecintaan mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat tipis. Oleh karena itu, pemerintah kembali menggalakkan pemupukan rasa nasionalisme melalui program bela negara. Dalam UUD 1945, Pasal 30, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Bela negara ini diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selain itu, pemerintah hendaknya memberikan pemahaman mengenai semangat cinta terhadap negara Indonesia.

Karena adanya kesadaran mengenai manfaat sejarah sebagai media pendidikan moral, penalaran, politik, kebijakan, perubahan, masa depan, dan keindahan<sup>2</sup> sehingga merupakan guru kehidupan (*historia magistra vitae*)<sup>3</sup> karena sejarah mampu menyediakan garis-garis pedoman yang sangat berfaedah (*worthwhile guidelines*) bagi masa depan, maka para sejarawan dari setiap bangsa, termasuk negara Indonesia, senantiasa berupaya mengembangkan historiografi mereka masing-masing, baik sejarah nasional maupun sejarah lokal. Di antara nilai-nilai yang dapat dipelajari dari penulisan sejarah adalah mengenai semangat patriotisme dan nasionalisme, yakni sikap seseorang yang menunjukkan kecintaan kepada tanah air atau bangsanya.<sup>4</sup>

Lingkup pembahasan utama dalam kajian ini mencakup kajian mengenai peristiwa-peristiwa yang mencerminkan semangat pengorbanan dan kepahlawanan masyarakat Ponorogo terhadap tanah tumpah darah mereka

---

<sup>1</sup> Di antara teror-teror ledakan bom di Indonesia ialah bom di kedutaan besar Filipina, Jakarta Pusat tanggal 1 Agustus 2000, Bursa Efek Jakarta tanggal 13 September 2000, Plaza Atrium Senen Jakarta tanggal 23 September 2001, restoran KFC, Makassar tanggal 12 Oktober 2001, Bali tanggal 12 Oktober 2002, restoran McDonald's, Makassar tanggal 5 Desember 2002, Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta tanggal 27 April 2003, JW Marriott, Jakarta, tanggal 5 Agustus 2003, kedutaan besar Australia, Jakarta, tanggal 9 September 2004, Ambon tanggal 21 Maret 2005, Tentena tanggal 28 Mei 2005, Bali tanggal 1 Oktober 2005, Palu tanggal 31 Desember 2005, Jakarta tanggal 17 Juli 2009, Cirebon tanggal 15 April 2011, Solo tanggal 19 Agustus 2012, Poso tanggal 9 Juni 2013, dan Jakarta tanggal 14 Januari 2016. Lihat [http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia).

<sup>2</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang, 1997), 24.

<sup>3</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2007), 285 dan Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 16.

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005), 997 dan 1068.

dalam melawan segala bentuk penindasan pihak lain. Karena judul penelitian ini terfokus pada penuturan yang disampaikan dalam *Babad Ponorogo*. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui perwujudan patriotisme masyarakat Ponorogo dan latar belakang terjadinya peristiwa-peristiwa patriotik di Ponorogo menurut penuturan *Babad Ponorogo*.

### **SEKILAS TENTANG *BABAD PONOROGO***

Nama asli Purwowijoyo adalah Sukatman Purwosuwito. Ia dilahirkan di Desa Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo pada tanggal 11 April 1914. Ia beragama Islam. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah sekolah guru selama empat tahun di Normal School Blitar pada tahun 1930-1934. Ia menikah dengan Yatini, gadis dari Tulungagung, pada tahun 1937. Dari pernikahan ini, ia dikaruniai sepuluh anak, yakni lima putra dan lima putri. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Normal School, Purwowijoyo menekuni aktivitas di bidang pengajaran. Di samping menjalani rutinitas di dunia pendidikan sebagai seorang pendidik, Purwowijoyo juga dikenal sangat aktif di dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Purwowijoyo wafat pada hari Ahad Pon, tanggal 20 Maret 1994 di kediamannya di Jalan Niken Gandini, nomor 18, Desa Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan istrinya meninggal pada 31 Januari 2004. Mereka berdua dimakamkan secara berdampingan di pemakaman keluarga yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal mereka.

Menurut penuturan Gun Purnoto, putra Purwowijoyo yang nomor lima, penulisan buku *Babad Ponorogo* semata-mata dilatarbelakangi oleh panggilan jiwa Purwowijoyo sebagai seorang pendidik untuk menyediakan buku referensi yang dapat menjadi pegangan bagi para guru yang ada di Ponorogo, khususnya. Dengan motivasi inilah, Purwowijoyo sangat bersemangat dan tanpa mengenal lelah menuliskan sejarah Ponorogo dan perkembangannya. Bahkan Purwowijoyo sebenarnya juga menulis sejarah desa-desa yang ada di Ponorogo. Pada masa sekarang hanya *Babad Ponorogo* yang dapat disaksikan, sedangkan karya-karya lainnya tidak diketahui keberadaannya. Meskipun pada saat itu hanya dengan mesin ketik yang sederhana sekali, namun kegigihan dan ketekunan Purwowijoyo sangat luar biasa. Dalam rangka menyusun karya historiografinya, Purwowijoyo rela melakukan penelusuran ke pelosok-pelosok desa agar mendapatkan narasumber dan referensi yang relevan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Berdasarkan wawancara dengan Gun Purnoto, putra ke-5 dari Purwowijoyo, di rumahnya, di Jl. Niken Gandini 18, Singosaren, Ponorogo, pada tanggal 29 Juli 2016, pukul 08.00, serta informasi yang tertulis di profil Purwowijoyo dalam *Babad Ponorogo*.

Figur Purwowijoyo yang penuh keteladanan hendaknya menjadi panutan bagi generasi selanjutnya, terutama masyarakat Ponorogo.

Untuk mengungkapkan motivasi penulisan *Babad Ponorogo* dapat diketahui dari kata pengantar Purwowijoyo di dalam karya monumentalnya tersebut. Ia menegaskan bahwa tujuan utama penulisan *Babad Ponorogo* adalah agar masyarakat Ponorogo khususnya dan seluruh warga negara Indonesia pada umumnya dapat meneladani perjuangan para perintis Kota Ponorogo dan pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mengorbankan segenap jiwa, raga, dan harta benda yang tiada ternilai harganya untuk kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia dari para penjajah. Oleh karena itu, setelah zaman kemerdekaan dicapai, maka seluruh bangsa Indonesia berkewajiban untuk bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan pembangunan agar terwujud masyarakat yang aman tenteram sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila.<sup>6</sup> Di samping dapat memberikan pelajaran bagi generasi penerus bangsa, buku *Babad Ponorogo* dapat bermanfaat sebagai referensi kepustakaan di lembaga pendidikan.<sup>7</sup>

Karena disadari bahwa penulisan buku *Babad Ponorogo* sangat besar manfaatnya, maka Drs. Soebarkah Poetra Hadiwirjo, bupati Ponorogo saat itu, mengapresiasi penerbitan buku ini dengan sambutannya yang bertanggal 10 Oktober 1984. Bupati merasa bangga sekali dengan penebitan *Babad Ponorogo* karena buku ini merupakan bentuk sumbangsih yang besar manfaatnya bagi masyarakat. Buku ini dapat memberikan gambaran dan petunjuk kepada pembaca mengenai pendiri Kabupaten Ponorogo. Selain itu, buku ini juga menambah wawasan dan koleksi bagi perpustakaan sebagaimana tujuan penerbitannya, yaitu agar dapat memberikan penjelasan kepada siapa saja yang ingin mengenal Ponorogo secara lebih dekat. Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memberikan andil yang memadai bagi kepentingan pembangunan budaya bangsa.<sup>8</sup>

Dukungan serupa juga disampaikan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo di dalam sambutannya bertanggal 26 Pebruari 1985. Drs. Kalil Imam Nawawi merasa sangat bangga dan berbahagia setelah penerbitan buku *Babad Ponorogo* karena bertepatan dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo

---

<sup>6</sup> Kata pengantar Purwowijoyo dalam *Babad Ponorogo*, Jilid V, 7-8.

<sup>7</sup> Kata pengantar Purwowijoyo dalam *Babad Ponorogo*, Jilid VII, 5.

<sup>8</sup> Sambutan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ponorogo, 10 Oktober 1984.

yang sedang mendorong upaya penggalian cerita rakyat dari daerah-daerah. Buku ini penting sekali sebab berhasil menguraikan secara gamblang mengenai sejarah Ponorogo mulai dari Bathoro Katong hingga bupati-bupati setelahnya, serta asal usul kabupaten-kabupaten yang ada di Ponorogo. Oleh karena itu, para guru dianjurkan memiliki buku ini agar dapat menggunakannya dalam memberikan nasehat dan cerita mengenai sejarah daerah. Generasi penerus bangsa juga seharusnya membaca sejarah daerah beserta sejarah para leluhur yang perjuangannya sangat besar dalam merintis pembukaan hutan menjadi desa hingga membangunnya menjadi negara. Buku ini mempunyai kegunaan dan manfaat besar bagi seluruh masyarakat.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa motivasi utama yang melatarbelakangi penulisan *Babad Ponorogo* adalah idealisme Purwowijoyo dalam rangka mencapai tujuan mulia, yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat luas, terutama melalui historiografi sejarah lokal yang berkaitan dengan asal usul Kabupaten Ponorogo dan perkembangannya sejak awal berdirinya hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan demikian, fungsi sejarah sebagai sarana edukasi masyarakat dapat terwujud.

Buku *Babad Ponorogo* diketik sendiri oleh Purwowijoyo dalam bahasa Jawa. Adapun penerjemahannya ke dalam bahasa Indonesia dilakukan oleh Drs. Sugiyanto sehingga manfaat karya tersebut semakin besar karena masyarakat yang tidak mampu berbahasa Jawa dapat membaca dan memahaminya dengan lebih mudah. Buku ini terdiri delapan jilid. Tetapi di penghujung karyanya yang jilid VIII, Purwowijoyo menuliskan bahwa buku jilid VIII akan dilanjutkan dengan jilid IX.

Di antara sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan *Babad Ponorogo* adalah *Sejarah Kanjeng Bathoro Katong* yang ditulis tangan beraksara Jawa setebal 34 halaman; *Sejarah Bekel Juru Kunci Makam Kanjeng Bathoro Katong* yang ditulis tangan beraksara Jawa setebal 23 halaman; *Pustaka Pratandha*, Lembaran tulisan aksara Jawa yang disimpan di Pasarean Gondolaya; *Lembaran Sejarah Keraton* yang ditulis tangan beraksara Jawa, milik Raden Sastramardika, Lurah Tajug, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo; *Pethikan Sejarah Keraton*, yang ditulis tangan dan dimiliki M. Achmad Yudoatmojo, pensiunan Kepala Sekolah Dasar Singgahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo; *Babad Banyumas* yang ditulis tangan beraksara

---

<sup>9</sup> Sambutan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo, tanggal 26 Pebruari 1985.

Jawa setebal 560 halaman dalam bentuk tembang, tersimpan di Museum Yogyakarta; *Naskah Crito Ponorogo* karya Raden Tumenggung Hariyo Sam, bupati Ponorogo, tersimpan di Museum Yogyakarta; *Surat Nithik Sultan Agungan*, tersimpan di Perpustakaan Museum Radya Pustaka di Surakarta; *Mengenal Ponorogo* yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo; Majalah berbahasa Jawa *Jaya Baya* tahun 1975, *Babad Tanah Jawa*; *Sejarah Indonesia* yang ditulis Setyowati Sulaiman dan diterbitkan Balai Pendidikan Bandung; *Sejarah Indonesia* yang ditulis Zainudin Saleh Anwar Dusky dan diterbitkan Penerbit Pustaka Dewata Jakarta; *Zaman Hindu* yang ditulis N.J. Krom dan diterjemahkan Arif Effendi ke bahasa Indonesia; *Geshiedkundiqe Aanteekeningngen Omtrent de Resisent van Madiun*, tersimpan di Museum Yogyakarta; *Sejarah Kyai Ageng Muhammad Besari Tegalsari Jetis Ponorogo* yang ditulis Kyai Moh. Purnomo; dan *Laporan dari Banaran*, ditulis T. B. Simatupang, Jakarta, 1961. Selain menggunakan berbagai referensi, Purwowijoyo juga melakukan wawancara dengan para sesepuh atau narasumber yang berkompeten serta mengadakan observasi langsung ke situs-situs bersejarah.

Secara teoritis, Purwowijoyo telah menerapkan metode historis dalam historiografinya. Ketika mengumpulkan data sejarah, kegiatan heuristik (pengumpulan data sejarah) itu dikaitkan dengan 3 P yang meliputi [1] *Paper*, yaitu dengan banyak membaca dokumen, buku, jurnal atau bahan tertulis lainnya; [2] *Person*, yaitu dengan bertemu, bertanya dan berkonsultasi kepada para ahli atau narasumber; dan [3] *Place*, yaitu dengan mendatangi tempat atau lokasi yang berhubungan dengan topik pembahasan. Data selanjutnya digolongkan menjadi tiga, yaitu [1] peninggalan material yang berupa candi, monumen, rumah ibadah, bangunan-bangunan, senjata, perhiasan, fosil, peralatan rumah tangga, dan lain-lain; [2] peninggalan tertulis yang berupa prasasti, manuskrip (seperti tulisan pada daun lontar), relief, kitab-kitab kuno, naskah-naskah perjanjian dan lain-lain; dan [3] peninggalan budaya yang berupa cerita rakyat, dongeng, nyanyian, bahasa kuno, adat istiadat, kepercayaan, tarian, dan lain-lain.<sup>10</sup> Berdasarkan tingkat keakuratannya, maka data tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yakni data primer (data yang disampaikan oleh saksi mata) dan data sekunder (data yang disampaikan oleh sumber yang bukan saksi mata).<sup>11</sup> Dengan demikian, buku *Babad Ponorogo* sangat representatif

---

<sup>10</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), 216.

<sup>11</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar*, 96.

untuk dipergunakan sebagai referensi penulisan karya ilmiah yang mengkaji sejarah Ponorogo.

## **PERWUJUDAN PATRIOTISME MASYARAKAT PONOROGO**

Menurut *Babad Ponorogo*, tercatat berbagai peristiwa yang menunjukkan sikap patriotik masyarakat Ponorogo daerah Ponorogo khususnya maupun bangsa Indonesia pada umumnya. Kecintaan mereka kepada tanah airnya tersebut diwujudkan dengan perlawanan terhadap penjajahan oleh bangsa lain hingga kemerdekaan Indonesia serta direalisasikan melalui pembangunan di berbagai bidang.

### **1. Pemberontakan terhadap kolonialisme**

#### **a. Perlawanan Raden Martopuro**

Raden Martopuro berprofesi sebagai mantri gudang kopi di Bungkal. Silsilahnya dari garis ayah adalah Raden Martopuro bin Raden Martokusumo (mantri gudang kopi di Bungkal) bin Raden Mas Sosrokusumo (patih di Kabupaten Ponorogo Tengah) bin Raden Adipati Surodiningrat (keturunan ke-13 dari Bathoro Katong). Ibunya bernama Raden Ayu Martokusumo binti Raden Tumenggung Sumonagoro (bupati di Somoroto) bin Tumenggung Prawirodirdjo (bupati di Somoroto) bin Raden Tumenggung Wirorejo (Bupati Nayaka Surakarta yang ditugaskan di Ponorogo).

Pada masa remaja, Raden Martopuro ikut Mas Bei Jogokaryo, bupati di Pacitan yang biasa disebut dengan Gusti Jimat. Pada saat itu Pangeran Diponegoro berperang melawan Belanda. Beserta pasukannya, Pangeran Diponegoro berhasil menduduki daerah Pacitan dan menetap di Desa Lorog. Bupati Pacitan dan Raden Martopuro kemudian bergabung dengan pasukan Diponegoro. Bupati Pacitan bahkan diangkat sebagai penasehat Pangeran Diponegoro. Ketika Desa Lorog jatuh ke tangan Belanda, Pangeran Diponegoro dengan pasukannya melarikan diri ke utara, yakni daerah Ponorogo. Beliau beristirahat di Desa Baosan, Kecamatan Ngrayun untuk sementara. Di sana Pangeran Diponegoro menyempatkan diri bercukur, rambutnya ditempatkan di sebuah kayu. Di kemudian hari, daerah tersebut dinamai Rambut, yang termasuk Desa Baosan. Dari Baosan Kidul, beliau meneruskan perjalanan ke Polorejo melalui Bungkal. Dari daerah Polorejo, beliau melanjutkan perjalanan ke arah barat memasuki wilayah Kasunan. Ketika sampai di daerah Wates, beliau berkata, "Saat ini kita sudah sampai di daerah Wates, wilayah Kejawan dan Gupernemen. Siapa yang menghendaki pulang, maka silahkan. Siapa yang akan terus mengikuti saya, maka diperbolehkan." Raden Martopuro tidak ikut

melanjutkan perjalanan dan kembali ke Bungkal. Setelah ayahnya meninggal, ia menggantikan posisi ayahnya sebagai mantri gudang kopi di Bungkal.

Raden Martopuro sewaktu mengikuti bupati Pacitan bersama-sama dengan seorang remaja dari Desa Bandaralim, Badegan, yang bernama Nurhandam. Kedua remaja itu ketika di sana dibekali dengan berbagai ilmu kanuragan yang menjadikan mereka kebal terhadap berbagai senjata. Mereka menguasai berbagai ilmu kesaktian, seperti aji sepiangin, kidang kencono, aji begonondo, dan lain sebagainya. Mereka merupakan saudara satu perguruan yang terikat oleh aturan bahwa mereka berdua tidak boleh saling menyakiti dan mereka harus rukun. Bahkan bisa dikatakan, apabila satu mati, maka satu lainnya juga harus mati.

Pada tahun 1836 Ponorogo sudah mempunyai seorang asisten residen, yang masih berdomisili di Madiun. Pada tahun 1837 asisten residen itu sudah menetap di Ponorogo, dengan dibantu oleh seorang kontroleer dalam menjalankan tugasnya. Pada saat itu pemerintah Hindia Belanda sedang gencar-gencarnya menanam kopi. Karena kopi merupakan tanaman yang bisa tumbuh di daerah pegunungan, maka rakyat diwajibkan menanamnya. Hasil dari tanaman tersebut harus dijual ke pemerintah Belanda dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Jika ada orang yang melanggar ketentuan Belanda dengan menjual ke pasar dan diketahui pemerintah Belanda, maka kopi tersebut dirampas dan pemiliknya dijatuhi hukuman.

Raden Martopuro merupakan keturunan seorang ningrat yang jauh dari sifat-sifat jahat, kejam ataupun sejenisnya. Istrinya juga berjiwa pengasih kepada semua warga. Meskipun ia mempunyai kedudukan dan kewenangan untuk mengatur sirkulasi perdagangan kopi di wilayah Ponorogo bagian selatan, namun ia tidak bersikap semena-mena. Ia tidak mau mencari perhatian atasannya agar diberi penghargaan, apalagi kepada orang Belanda. Ia juga bersikap mengayomi dan melindungi kepada bawahannya.

Daerah Bungkal dan sekitarnya termasuk daerah subur yang menghasilkan kopi berkualitas baik. Tetapi setoran kepada pemerintah Belanda paling sedikit dibandingkan dengan daerah lain-lainnya. Hal yang demikian tentu saja menyebabkan kontroleer maupun asisten residen tidak menyukainya. Pada suatu hari, Raden Martopuro mendapatkan surat dari kontroleer bahwa daerah Bungkal akan diperiksa. Ternyata sebelum hari pemeriksaan, kontroleer sudah mengatur siasat dengan melakukan operasi cegatan (*razia*). Kira-kira dua kilometer dari Bungkal, pemerintah dengan cara sembunyi-sembunyi telah

mengadakan operasi pemeriksaan kopi. Pemeriksaan itu hanya berlaku untuk daerah Bungkal. Mantri yang menjadi pejabat tidak diberi informasi mengenai pemeriksaan itu. Petugas yang menjalankan pemeriksaan adalah kontroleer, mantri dari Pulung, dan tiga mandor yang juga dari Pulung. Semua mandor dipilih dari orang-orang yang paling kejam di wilayahnya. Setiap ada orang yang membawa keranjang atau tempat (wadah) apapun pasti diberhentikan. Jika orang-orang itu diketahui membawa kopi, maka mereka langsung dihajar habis-habisan dan kopinya dirampas.

Setelah pemerikasaan terungkap bahwa Raden Ayu Mantri, isteri mantri Raden Martopuro, membantu petani dalam perdagangan kopi yang merugikan pemerintah Belanda. Setelah peristiwa itu, terdapat peristiwa lain yang membuat perjalanan kehidupan Raden Martopuro berubah. Pada saat itu, seorang asisten residen di Ponorogo bernama Antony Willem Viensen mendapatkan laporan kontroleer mengenai setoran kopi daerah Bungkal. Asisten residen kemudian ingin melihat langsung ke daerah Bungkal. Setelah pemeriksaan di setiap pos yang ditentukan selesai dikerjakan, maka asisten residen berkunjung ke rumah mantri Raden Martopuro yang disebut Kemantren. Diceritakan bahwa asisten residen semenjak awal memang telah mendengar tentang kecantikan Raden Ayu Martopuro sehingga ia merasa sangat kagum dan terpesona setelah menyaksikan langsung keelokan perempuan tersebut. Ia terlihat gugup dan jantungnya berdegup. Pada saat berjabat tangan, ia seketika itu langsung memegang dahi dan mencolek pipi istri Raden Martopuro. Saat itu, Raden Martopuro berpakaian Kejawen lengkap dengan kerisnya. Melihat kelakuan kurang ajar dari asisten residen itu, Raden Martopuro mulai menyiapkan kerisnya dan hendak menghunus kerisnya. Namun ia dilarang oleh para mandor yang berdiri di belakangnya. Meskipun ia bisa mengurungkan niatnya untuk membunuh asisten residen, namun ternyata ia tetap bertekad untuk membalas perbuatan asisten residen yang mempermalukannya tersebut dengan menghabisi nyawa asisten residen. Baginya, *Sadumuk bathuk*, *Sanyari bumi*, sesuatu yang menjadi hak seseorang wajib dipertahankan apabila diganggu oleh pihak lain, walaupun harus dengan nyawa sebagai taruhannya, dan sekecil apapun hak itu.

Pada tanggal 31 Desember 1852 di depan pendopo asisten residen telah dipersiapkan kegiatan menyongsong pergantian tahun baru dengan berbagai hiasan. Semua pegawai kabupaten, mulai yang berpangkat rendah sampai yang berpangkat tinggi diundang ke kabupaten. Semua berpakaian Kejawen

sesuai dengan kepangkatannya, yakni memakai kain, destar, dan memakai keris. Saat itu, Raden Martopuro yang menjabat sebagai mantri gudang juga hadir. Setelah acara pergantian tahun selesai, Raden Martopuro menghadap asisten residen. Sebelum sempat berjabat tangan, Raden Martopuro langsung menusukkan kerisnya ke perut asisten residence hingga tewas seketika. Semua penjaga mengetahui kejadian tersebut. Mereka berteriak meminta tolong. Raden Martopuro melarikan diri

Pagi harinya, jenazah asisten residen dimakamkan. Selanjutnya, sepasukan tentara yang dikirim dari Madiun didatangkan ke Ponorogo untuk menangkap Raden Martopuro. Pencarian dipusatkan di sekitar daerah Bungkal, terutama di rumah Raden Martopuro yang diobrak-abrik. Semua lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian diperiksa. Tetapi para tentara itu tidak dapat menemukan keberadaan Raden Martopuro. Setelah pencarian berlangsung selama satu minggu, maka pemerintah Belanda memasukkan anak, istri, dan ibunda Raden Martopuro ke dalam penjara. Mereka diinterogasi tentang persembunyian Raden Martopuro. Tetapi hasilnya tetap nihil. Akhirnya pemerintah Belanda mengadakan sayembara bahwa barangsiapa yang dapat menemukan Raden Martopuro, maka ia akan mendapatkan hadiah uang berlimpah dan diberi pangkat yang tinggi.

Pada saat peristiwa pembunuhan terjadi, pemerintahan di Kabupaten Ponorogo berada dibawah kepemimpinan Raden Adipati Martohadinegoro. Istrinya masih keturunan Bathoro Katong. Residen di Madiun kemudian menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah tersebut kepada bupati Ponorogo. Pada suatu malam bupati Ponorogo bersemadi di makam Bathoro Katong hingga akhirnya ia mendapatkan wangsit yang berbunyi *Ana jago saka kulon. Edunen padha banyune*. Maksud dari kalimat di atas adalah bahwa ada orang sakti yang berasal dari barat dan orang itu merupakan saudara seperguruan dengan Raden Martopuro, maka keduanya harus diadu domba agar menjadi saling memusuhi.

Pada suatu malam, seorang perangkat desa di Bandaralim, Badegan, menghadap ke kabupaten dengan mengajak Nurhandam, seorang penjahat yang sudah tujuh kali keluar masuk penjara akibat perkara pembunuhan. Tetapi ia sudah bertaubat. Bupati Ponorogo sudah mengetahui hal ikhwal Nurhandam karena Nurhandam sering terlibat perkara pembunuhan. Bupati Ponorogo kemudian berpikir bahwa kedatangan Nurhandam barangkali merupakan penjelmaan wangsit yang diterimanya. Pada mulanya, Nurhandam tidak mau

menuruti keinginan bupati Ponorogo agar menangkap Raden Martopuro. Ia menolak keras untuk mengkhianati Raden Martopuro, walaupun diberi imbalan yang sangat besar karena tidak mau mencelakai kawan seperguruannya. Bupati Ponorogo kemudian memberikan jaminan bahwa Raden Martopuro tidak akan dijatuhi hukuman kalau ditangkap hidup-hidup. Mendengar ucapan itu, Nurhandam akhirnya mengikuti kehendak bupati. Sebagai imbalannya, bupati memberikan sekantong uang dan sepucuk surat ditujukan kepada asisten residen yang baru.

Setelah menghadap asisten residen bernama Eduardus Martines Rudolf, Nurhandam pada malam Jum'at Kliwon bersemadi di bawah pohon bambu gading yang terletak di kebun belakang rumah asisten residen. Ia memusatkan penerawangannya hingga mampu melihat Raden Martopuro yang sedang duduk bersedekap di bawah pohon sono. Nurhandam menghentikan semadinya dan melakukan perbincangan dengan Raden Martopuro.

Raden Martopuro pada awalnya meragukan jaminan keamanan yang dikatakan bupati Ponorogo. Namun Nurhandam berhasil meyakinkannya hingga ia akhirnya bersedia menyerahkan diri. Lagipula ia merasa kasihan kepada keluarganya, terutama ibundanya, yang ditahan oleh pemerintah kolonial. Ia berharap setelah dirinya menyerah, maka keluarganya akan dibebaskan dari penjara. Ketika waktu subuh, keduanya sudah menghadap asisten residen. Raden Martopuro lalu ditahan di dekat kantor asisten residen. Ternyata keputusan pengadilan menjatuhkan hukuman gantung kepada Raden Martopuro. Kabar mengenai hukuman gantung tersebut menggemparkan masyarakat Ponorogo. Apalagimerekamengetahui bahwaorangyangmenangkapnyaadalahNurhandam, kawan seperguruan Raden Martopuro. Sebelum pelaksanaan hukuman gantung pada Jum'at malam di rumah tahanan, semua warga melakukan tirakatan untuk mendoakan Raden Martopuro.

Nurhandam mengunjungi Raden Martopuro di dalam penjara. Ia menjumpai Raden Martopuro sedang duduk bersedekap di pojok ruang tahanan. Ia melaporkan bahwa keluarga Raden Martopuro sudah diantarkannya kembali ke Bungkal dengan selamat. Raden Martopuro mengatakan bahwa dirinya tidak keberatan menjalani hukuman karena ia telah melakukan pembunuhan. Namun ia bertanya kepada Nurhandam mengenai ucapan guru mereka bahwa *Sedulur tunggal janji. Sedulur janji iku bareng mati*. Nurhandam menjawab bahwa takdir di tangan Tuhan dan ucapan guru mereka belum tentu benar. Karena Raden Martopuro tidak terima dengan jawabannya yang menyalahkan gurunya, maka

Nurhandam bersumpah bahwa ia rela mati lebih dulu jika dirinya mempunyai niat jahat kepada kawannya sendiri. Bumi dan langit menjadi saksi sumpahnya.

Raden Martopuro mendoakan agar sumpah itu dikabulkan Tuhan. Ia berkata bahwa dirinya menyesal telah menyerahkan diri yang malah membawanya dihukum gantung secara terhina. Baginya lebih baik meninggal di medan peperangan menghadapi musuh daripada meninggal digantung dan disaksikan banyak orang. Ia kemudian mengambil kerisnya yang disimpan di sabuknya. Keris Kalanadhah itu diberikan kepada Nurhandam. Namun sebelum diberikan, keris itu ditusukkan oleh Raden Martopuro ke dadanya sendiri. Ia menyuruh Nurhandam mengambil keris itu. Setelah keris diambil, darah menyembur mengenai dada Nurhandam. Kemudian Nurhandam melaporkan kejadian itu kepada dua penjaga dan asisten residen sambil membawa keris. Dua penjaga memeriksa Raden Martopuro dan menduganya sudah meninggal sehingga asisten residen memerintahkan agar memakamkannya di tempat sampah.

Sementara itu, Nurhandam yang melaporkan hal itu kepada asisten residen justru dijadikan tersangka dengan dua prajurit sebagai saksi dan sebilah keris Kalanadhah sebagai bukti. Pembelaannya tidak diterima sehingga ia dijatuhi hukuman mati. Setelah kepalanya dipenggal, jasadnya dimakamkan di lubang yang berdekatan dengan Raden Martopuro. Tetapi kenyataannya lain. Raden Martopuro yang dianggap sudah meninggal ternyata hanya pingsan, apalagi cara penguburannya juga tidak sempurna. Ia kemudian keluar dari tempat pemakamannya dan meninggalkan pekarangan rumah asisten residen. Ia berjalan ke arah timur sampai di Desa Mangunsuman dan bertemu dengan seorang warga yang menceritakan kisahnya. Ia akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dan dimakamkan di pemakaman Pelemgurih, Desa Mangunsuman. Peristiwa Raden Martopuro dan Nurhandam tersebut sesuai dengan ungkapan peribahasa Jawa *Ngisor galeng, Dhuwur Galeng, Mati bareng*, yakni gambaran mengenai dua saudara seperguruan yang mengikap sumpah “saya mati, kamu juga mati”.<sup>12</sup>

#### **b. Perlawanan Kampak Patik**

Patik adalah nama desa di Kecamatan Pulung yang terletak di dataran tinggi dan tanahnya menghasilkan banyak buah jeruk. Pada masa kepemimpinan Bupati Raden Mas Tumenggung Cokronegoro I, yang disebut pula dengan nama Gusti Lider atau Gusti Kasepuhan, keadaan Kabupaten Ponorogo sangat

---

<sup>12</sup> Purwowijoyo, *Babad Ponorogo*, Jilid VI A (Ponorogo: Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 1985), 11-28.

makmur. Ia mempunyai tujuh putra. Anak pertama bernama Raden Mas Ibnu Hasan yang dikenal dengan nama Patih Jilitheng karena menjabat sebagai patih di Ponorogo. Ia sangat merakyat serta gemar bercocok tanam sehingga rakyat Ponorogo menghormati dan mematuhi. Namun penjajah Belanda tidak menyukainya karena ia dinilai sering berani dan menentang Belanda. Oleh karena itu, ketika ayahnya pensiun pada tahun 1882 ia tidak dipilih Belanda menggantikan kedudukan ayahnya. Belanda justru memilih Imam Bukhori atau Raden Mas Tumenggung Cokronegoro II, anak yang nomor tujuh. Keputusan itu diterima Patih Jilitheng dengan legowo. Sebelum ayahnya meninggal pada 20 Maret 1900, ia mendapatkan warisan berupa tombak kecil dari ayahnya.

Di Desa Sugihan, Kecamatan Pulung, terdapat gudang kopi yang dipimpin oleh orang Belanda dan dibantu mantri dan mandor. Pada suatu malam di Desa Patik diadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat. Mereka membahas masalah beban pajak yang sangat berat dan pemaksaan penjualan kopi kepada penjajah Belanda. Musyawarah itu menghasilkan keputusan bahwa masyarakat Desa Patik tidak mau membayar pajak apabila jumlah besaran pajak tidak diturunkan. Selain itu, mereka akan membunuh kontroleer bernama Tan Cate yang biasa berbuat kejam dan semena-mena kepada masyarakat apabila ia tidak menghentikan kekejamannya itu. Mereka juga bersepakat untuk merahasiakan hasil keputusan musyawarah tersebut.

Sesaat setelah musyawarah selesai, ada tiga orang yang datang bertamu. Mereka adalah Patih Jilitheng bersama dua pengawalinya. Patih Jilitheng langsung disambut dan diberi informasi mengenai permasalahan yang dibahas dalam musyawarah desa. Patih Jilitheng mendukung gerakan mereka. Ia bahkan memberikan tombak pusaka yang diwarisi dari ayahnya kepada Raden Martorejo. Ia juga berpesan agar dalam melakukan gerakan mereka hanya membunuh warga Belanda dan dilarang mengambil harta orang lain atau menyakitinya, kecuali jika ia melawan. Pimpinan gerakan dipegang oleh carik desa bernama Raden Martorejo yang berganti nama menjadi Joko Lelono.

Pada tanggal 15 September 1885 Joko Lelono beserta kawan-kawannya sampai di Desa Sugihan. Gudang kopi dan rumah kontroleer dikepung. Tetapi saat itu kontroleer tidak ada di rumah karena ia sedang pergi ke Madiun. Selanjutnya mereka membakar gudang kopi dan rumah kontroleer. Para penjaga dan pamong desa tidak berani menghalangi. Jika ada yang berani melawan, maka ia akan dihajar tanpa membahayakan jiwanya. Sebelum gudang kopi dibakar, maka masyarakat sekitar gudang kopi disuruh mengambil kopi sesuai kebutuhan

mereka. Sedangkan kelompok Kampak Patik tidak ada yang menjarah sedikitpun karena tujuan mereka adalah mencari kontroleer. Situasi semakin panik sebab setiap desa membunyikan kentongan tanda bahaya secara bersahut-sahutan.

Pada pagi harinya, berita tentang peristiwa itu sudah menyebar sampai ke Ponorogo. Lima hari berikutnya, pada sekitar pukul 09.00 Kampak Patik mendatangi kantor kawedanan yang saat itu dipimpin oleh Raden Sastrorejo. Mereka mengobrak-abrik kantor kawedanan sambil disaksikan masyarakat karena dalam beraksi biasanya mereka selalu membunyikan bende (semacam gong kecil) sehingga banyak warga yang mengetahuinya. Menyikapi peristiwa itu, asisten residen, komandan militer, kepolisian, dan pamong praja kemudian melakukan musyawarah di pendopo asisten residen. Asisten residen memerintahkan kepada bupati Ponorogo, Raden Mas Ibnu Hasan dan Patih Jliheng untuk menangkap Kampak Patik. Tetapi Patih Jliheng menolak perintah itu dengan alasan bahwa tugas itu adalah kewenangan bupati Ponorogo. Bupati lalu memanggil para wedana dan memerintahkan mereka untuk menjaga wilayahnya masing-masing. Kondisi yang demikian membuat pejabat-pejabat Belanda tidak berani bermalam di Ponorogo. Apalagi kontroleer Desa Sugihan yang tidak berani lagi kembali ke Desa Sugihan karena merasa terancam.

Sementara itu, Kampak Patik akan memasuki wilayah Balong melalui Ngasinan. Lurah Karanggebang yang bernama Raden Martodipuro segera menemui wedana Balong yang bernama Raden Mas Joyohadikusumo yang sedang menerima tamu Naib Wedana. Wedana Balong sangat marah mendengar rencana kedatangan Kampak Patik itu ke wilayahnya. Ia menyiapkan persenjataan untuk menangkap Kampak Patik. Tetapi keinginan itu dicegah oleh Raden Martodipuro yang menyarankan agar jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Naib Wedana menyarankan pula agar Kampak Patik diberi minuman yang dicampur dengan bubuk kecubung karena minuman itu tidak membahayakan dan hanya membuat peminumnya tidak ingat apa-apa sehingga setelah bangun dari tidur ia akan pulih dan sadar kembali.

Selanjutnya, buah kecubung yang disebut genje dicari. Genje lalu digoreng dan dijadikan bubuk halus seperti kopi. Ketiga pejabat tersebut memerintahkan seorang janda pemilik warung di Dukuh Doplang, Desa Bajang, yang akan dilintasi Kampak Patik, agar menyuruh kelompok itu untuk singgah di warungnya. Pada malam Jum'at ketika Kampak Patik melintas di depan warungnya, maka janda tersebut mempersilahkan mereka supaya singgah di warungnya. Tidak seberapa lama setelah semua anggota Kampak Patik meminum suguhan kopi yang terbuat

dari genje tersebut, maka seluruh Kampak Patik mulai merasa pusing dan jatuh dengan sendirinya secara tidak sadar. Tiga pejabat pemerintah yang berada di dekat tempat kejadian langsung memerintahkan para warga untuk menangkap Kampak Patik yang berjumlah sekitar 20 orang. Kampak Patik kemudian dibawa ke Kabupaten dan dimasukkan ke dalam penjara.

Setelah proses pengadilan selesai, akhirnya pengadilan menjatuhkan vonis hukuman kepada orang-orang yang terlibat Kampak Patik. Raden Martorejo, carik Patik, dijatuhi hukuman seumur hidup dan kemudian dibuang ke Sawahlunto. Lurah Wiryodikromo dihukum selama 29 tahun. Sebagian mendapatkan hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan keterlibatannya. Pada tahun 1919 Raden Martorejo mendapatkan pengampunan dan dibebaskan. Ia diantarkan ke rumahnya di Desa Patik. Sedangkan Patih Jliteng dipindahkan ke Gresik. Sebaliknya, Wedana Balong diangkat menjadi patih di Pacitan, Bupati Cokronegoro II mendapat penghargaan bintang emas, Lurah Karanggebang mendapatkan penghargaan bintang perunggu, dan Naib Balong mendapatkan kenaikan pangkat.<sup>13</sup>

Di samping perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Raden Martopuro dan Kampak Patik, sebenarnya terdapat pula peranan masyarakat Ponorogo dalam menentang penjajah ataupun mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Misalnya, bantuan masyarakat Ponorogo kepada pasukan Pangeran Diponegoro selama perjuangannya mengusir penjajah (sepaimana diterangkan di depan) dan peran aktif mereka dalam membantu Jenderal Soedirman ketika melakukan gerilya melawan penjajah Belanda atau pada saat menghadapi Jepang yang meneruskan penjajahan Belanda.<sup>14</sup>

## **2. Pembangunan Daerah Ponorogo**

Setelah Bathoro Katong menjabat sebagai adipati di Ponorogo, ia secara sungguh-sungguh memberikan perhatiannya kepada pembangunan Ponorogo dan berdakwah dalam rangka penyebaran agama Islam. Di antara pembangunan yang dilakukannya adalah penataan kota Ponorogo dan pembangunan masjid. Sebagai sarana dakwah, ia tetap melestarikan kesenian reog yang sebelumnya sudah ada pada masa Kerajaan Wengker. Ia bahkan memodifikasi reog dengan menambahkan burung merak yang di paruhnya terdapat untaian permata. Selain itu, ia menciptakan kesenian baru yang diberi nama Jemblung. Karena

---

<sup>13</sup> Ibid., Jilid VI B, 7-16.

<sup>14</sup> Ibid., Jilid IV, 33.

Ponorogo semakin maju, maka banyak pendatang dari luar Ponorogo yang kemudian memutuskan untuk menetap di Ponorogo.<sup>15</sup>

Para pemimpin Ponorogo setelah Bathoro Katong meneruskan pembangunan yang telah dicontohkan oleh Bathoro Katong. Mereka juga memperhatikan kesejahteraan rakyat Ponorogo. Keadaan kehidupan masyarakat bertambah makmur dan aman. Tetapi kondisi menggembirakan tersebut terhambat dengan kedatangan penjajah Belanda hingga Jepang yang menjadikan masyarakat Ponorogo mengalami penindasan dan penderitaan memilukan. Perubahan besar-besaran baru terjadi setelah bangsa Indonesia meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Presiden Soekarno yang didampingi wakilnya, Muhammad Hatta.

Pembangunan kota Ponorogo memang dikerjakan secara berkelanjutan, meskipun terdapat kendala di tengah perjalanannya. Kendala-kendala tersebut di antaranya adalah bencana kelaparan akibat serangan tikus yang menjadikan pertanian Ponorogo mengalami kegagalan dan kemunculan berbagai wabah penyakit yang banyak menelan korban dari masyarakat Ponorogo. Di samping bencana yang ditimbulkan oleh faktor alam, pembangunan Ponorogo juga terhambat oleh situasi politik setelah kemerdekaan Republik Indonesia yang belum kondusif. Misalnya, pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1948 dan 1965 yang mengakibatkan banyak warga meninggal, serta agresi militer penjajah Belanda pada tahun 1947 dan 1949 karena Belanda ingin menjajah kembali negara Indonesia.

## **LATAR BELAKANG PATRIOTISME MASYARAKAT PONOROGO**

Dalam kaitannya dengan fokus pembahasan, keteladanan masyarakat Ponorogo dalam menunjukkan sikap kecintaan mereka kepada tanah airnya (Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Ponorogo pada khususnya) sebagaimana diuraikan di atas, tentu tidak tampil begitu saja ke permukaan sejarah tanpa didorong oleh adanya faktor yang melatarbelakanginya. Faktor pendorong tersebut dapat pula dikaitkan dengan kondisi yang terjadi sebelumnya. Misalnya, dalam konteks masyarakat Ponorogo dapat dibandingkan pula dengan kondisi masyarakat Jawa pada umumnya, terutama kondisi yang diperkirakan turut berperan secara signifikan kepada keadaan masyarakat di Ponorogo. Penelusuran sejarah Jawa menunjukkan bahwa sejak sekitar tahun 1830 di pulau Jawa terdapat

---

<sup>15</sup> Ibid., Jilid I, 63-64.

perubahan signifikan.

Pada tahun 1830 dimulailah masa penjajahan yang sebenarnya dalam sejarah Jawa. Untuk yang pertama kalinya, pihak penjajah Belanda mampu mengeksploitasi dan menguasai seluruh pulau ini, dan tidak ada tantangan yang serius terhadap kekuasaan mereka sampai abad XX. Tetapi, harus diakui bahwa keadaan mereka memang agak aneh. Namun secara finansial ternyata sebaliknya, yakni usaha itu mengalami suatu kegagalan.<sup>16</sup> Pada masa itu defisit keuangan pemerintah kolonial semakin membesar yang antara lain disebabkan oleh Perang Diponegoro yang menelan banyak biaya. Selain itu, pemasukan pajak tanah belum berjalan lancar. Di Nederland kesulitan ekonomi bertambah besar dengan terjadinya pemisahan Belgia pada 1830. Akibatnya, Belanda banyak kehilangan industrinya sehingga tidak dapat menyaingi Inggris dalam ekspor hasil industri ke Indonesia. Lagipula, sumber keuangan yang berupa tanah negara di Belgia yang disewakan juga hilang. Dalam menghadapi bahaya kebangkrutan pemerintah Belanda, maka diterapkanlah suatu ekonomi politik di Jawa yang akan dapat menyelamatkan negeri Belanda.<sup>17</sup> Pada tahun 1830 pemerintah Belanda mengangkat Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch bagi negeri Indonesia yang diberi tugas utama untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor yang terhenti selama sistem pajak tanah berlangsung.<sup>18</sup> Van den Bosch menerapkan konsep daerah jajahan sebagai tempat mengambil keuntungan bagi negeri induk, atau seperti dikatakan Baud sebagai “gabus untuk tempat Nederland mengapung”. Dengan perkataan lain, Jawa dipandang sebagai sapi perahan. Berbeda dengan sistem sebelumnya, sistem tanam paksa yang diusulkan van den Bosch didasarkan atas prinsip wajib (paksa) dan prinsip monopoli.<sup>19</sup>

Sistem tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial mampu memberikan hasil yang sangat menggembirakan bagi pemerintah Belanda yang diungkapkan dengan istilah *Batig Slot* (saldo plus) dalam neraca keuangan yang menguntungkan. Sumbangan dari hasil sistem tanam paksa sangat berlimpah kepada perbendaharaan negara di Nederland. Defisit keuangan yang sebelumnya

---

<sup>16</sup> M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, terj. Dharmono Hardjowidjono (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), 182-183.

<sup>17</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium*, Jilid I (Jakarta: Gramedia, 1999), 305-308.

<sup>18</sup> Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid IV (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 97.

<sup>19</sup> Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah*, 305-308.

terjadi dapat ditutup. Hutang-hutang VOC (perusahaan dagang Belanda) dapat dibayarkan. Hutang Belanda pada masa pemerintahan van der Capellen dapat dilunasi dan pengeluaran selama perang Diponegoro dapat diganti.<sup>20</sup> Di sisi lain, keadaan rakyat jajahan semakin menderita akibat pelaksanaan sistem tanam paksa. Beban hidup yang dipikul rakyat sangat berat.<sup>21</sup> Para pemilik tanah kemudian menyerahkan pengusahaan tanah kepada desa atau warga lainnya. Dislokasi penduduk desa terjadi akibat pengiriman tenaga kerja secara paksa ke daerah-daerah lain.<sup>22</sup> Jika selama penjajahan zaman VOC pelaksanaan penyerahan wajib (*contingenteringen*) diserahkan kepada para pemimpin rakyat sendiri, maka selama sistem tanam paksa para pegawai Eropa bersikap sewenang-wenang kepada rakyat sehingga memperberat beban rakyat.<sup>23</sup> Pada saat itu, rakyat dipaksa bekerja jauh lebih lama untuk penanaman paksa daripada untuk nafkah mereka sendiri. Jadi, rakyat harus menanggung beban pekerjaan paksa untuk menanam tanaman-tanaman ekspor dan pembayaran pajak tanah. Apalagi jika terjadi kegagalan panen, maka kerugian akibat kegagalan tersebut dibebankan lagi kepada rakyat.<sup>24</sup>

Pada dasarnya, sistem tanam paksa merupakan bentuk eksploitasi terhadap rakyat pribumi secara berlebihan yang surplus hasilnya dinikmati untuk kepentingan penjajah Belanda.<sup>25</sup> Karena keadaan kontradiktif antara penjajah Belanda dan rakyat Indonesia yang terjajah, maka Conrad Th. van Deventer dalam majalah *De Gids*, 1899 melancarkan kritik kepada pemerintah kolonial dengan tulisannya berjudul *De Eereschuld (A Debt of Honor)* atau Hutang Kehormatan. Pada hakikatnya, kemajuan Kerajaan Protestan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda diperoleh dari pengorbanan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, hutang kehormatan itu wajib dibayar pemerintah kolonial Belanda dengan memajukan pendidikan kaum pribumi.<sup>26</sup>

Kondisi demikian inilah yang menyebabkan timbulnya perlawanan-perlawanan rakyat kepada pemerintah kolonial. Perjuangan-perjuangan rakyat tersebut dalam skala yang bervariasi, baik berbentuk perlawanan besar maupun perlawanan kecil berupa kericuhan-kericuhan sosial.<sup>27</sup> Sebagian

---

<sup>20</sup> Ibid., 312.

<sup>21</sup> Ibid., 304.

<sup>22</sup> Ibid., 319.

<sup>23</sup> *Poesponegoro, Sejarah Nasional*, Jilid IV, 101.

<sup>24</sup> Ibid., 104-106.

<sup>25</sup> *Kartodirdjo, Pengantar Sejarah*, 322 dan 330.

<sup>26</sup> *Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah* (Bandung: Salamadani, 2009), 302.

<sup>27</sup> *Poesponegoro, Sejarah Nasional*, Jilid IV, 148-149.

besar perlawanan rakyat tersebut dilakukan dengan organisasi, strategi, dan taktiknya yang sangat sederhana sehingga sangat tradisional jika dibandingkan dengan gerakan modern seperti yang dilancarkan oleh komunisme, sosialisme, dan fasisme. Oleh sebab itu, pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan rakyat Indonesia dapat ditumpas dengan sangat mudah oleh kekuatan militer penjajah kolonial. Pada umumnya gerakan-gerakan sosial semacam itu berumur sangat pendek dan merupakan pergolakan lokal atau regional yang tidak ada koordinasi satu sama lain.

Selama periode antara abad XIX sampai XX hampir setiap daerah mengenal masa-masa pergolakan yang tercermin dalam bentuk gerakan-gerakan sosial dengan segala perkembangannya. Secara luas gerakan-gerakan itu dapat diklasifikasikan menjadi empat golongan sesuai dengan landasan-landasan pokok yang mendorong timbulnya gerakan tersebut. Pertama, jenis gerakan sosial yang melawan keadaan atau peraturan yang tidak adil. Dalam hal ini, ideologi pokok yang mendorong timbulnya gerakan itu adalah adanya rasa dendam terhadap kondisi sosial ekonomis yang kurang memberi tempat yang bebas bagi kehidupan para pendukungnya. Kedua, jenis gerakan ratu adil, yaitu suatu gerakan yang bersifat mesianistis yang memuat harapan terhadap kedatangan ratu adil atau Imam Mahdi sebagai juru selamat rakyat. Ketiga, jenis gerakan Samin yang menentang pemerintah secara pasif dan menghindari kekerasan. Keempat, jenis gerakan sekte keagamaan yang kegiatannya bertujuan agar rakyat lebih rajin menjalankan kewajiban agamanya. Sebagai bukti adanya gerakan jenis ini, maka sejak tahun 1860 banyak didirikan masjid, pesantren, dan tarekat.<sup>28</sup>

Dalam kaitannya dengan perlawanan masyarakat Ponorogo terhadap pemerintah kolonial Belanda, sebagaimana diteladankan oleh Raden Martopuro pada 1853 dan Kampak Patik pada 1885, maka dapat dinyatakan bahwa gerakan mereka termasuk ke dalam jenis pertama dari gerakan sosial yang melawan keadaan atau peraturan yang tidak adil. Mereka memprotes kondisi sosial ekonomis yang dialami masyarakat akibat penindasan pemerintah Belanda. Kesewenang-wenangan penjajah saat itu juga disebabkan peraturan pemerintah kolonial yang memaksa petani di Ponorogo untuk menanam tanaman yang laku di pasaran ekspor dengan menerapkan monopoli sehingga rakyat tidak berdaya. Apalagi hukuman yang diterima rakyat sangat berat apabila mereka melanggar

---

<sup>28</sup> Ibid., 281-282 dan pengantar Djoko Surjo untuk *Indonesia dalam Arus Sejarah*, Jilid IV (Jakarta: PT Ictiar Baru van Hoeve, 2012), 3.

peraturan penjajah tersebut. Jadi, perlawanan masyarakat Ponorogo waktu itu bersifat multikausal karena dilatarbelakangi oleh situasi politik penjajahan bangsa asing yang merugikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Ponorogo. Perjuangan mereka tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan mulia, yaitu kebebasan mereka dari penjajahan Belanda, meskipun gerakan mereka sangat mudah dipadamkan oleh pemerintah lokal yang tidak dapat menolak tekanan pemerintah kolonial Belanda.

Adapun sikap patriotisme masyarakat Ponorogo yang direalisasikan dalam bentuk pembangunan di berbagai bidang dilandasi oleh keinginan mulia juga sebagaimana perlawanan kepada penjajah. Perbedaannya terletak pada situasi yang melingkupi ketika masing-masing sikap patriotisme ditunjukkan. Pada bentuk pertama, situasi politiknya masih berada dalam cengkeraman penjajah Belanda. Sedangkan pada bentuk yang kedua, situasinya ketika sudah meraih kemenangan atau kemerdekaan sehingga pembangunan tersebut dapat dilakukan secara bebas tanpa tekanan ataupun rongrongan pihak lain.

Pada saat pemerintahan Bathoro Katong dan para bupati sesudahnya, pembangunan dilaksanakan untuk meraih tujuan yang diharapkan, yakni kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam konteks sejarah nasional Indonesia, pembangunan adalah proses perubahan terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju tujuan yang ingin dicapai. Tujuan mulia yang diinginkan tersebut adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual. Pelaksanaan pembangunan nasional itu bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.<sup>29</sup>

Secara garis besar, karakteristik pembangunan Ponorogo dapat dikelompokkan menjadi tiga periode, yaitu periode sebelum penjajahan bangsa asing, periode penjajahan bangsa asing, dan periode setelah kemerdekaan. Sebelum adanya penjajah, pemerintah Kabupaten Ponorogo mempunyai kebebasan dalam menentukan arah pembangunan. Namun ketika berada di bawah kungkungan penjajah, pemerintah Kabupaten Ponorogo dipaksa untuk mengikuti segala peraturan yang ditetapkan oleh penjajah sehingga pada saat itulah dijumpai perlawanan masyarakat terhadap penjajah. Adapun pada masa setelah kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Ponorogo melaksanakan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan, walaupun situasi politik di era Orde Lama yang belum stabil mengakibatkan bangsa Indonesia tidak optimal dalam

---

<sup>29</sup> Poesponegoro, *Sejarah Nasional*, Jilid VI, 440.

melaksanakan pembangunan. Keadaan bertambah baik setelah pergantian pemerintahan ke Orde Baru yang berhasil mewujudkan stabilitas nasional secara lebih optimal sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lebih lancar. Semenjak itulah, pembangunan di Kabupaten Ponorogo diarahkan untuk mengikuti program-program pemerintah pusat agar tidak ada pertentangan antara program daerah dan program nasional. Dengan tercapainya tujuan pembangunan daerah Ponorogo, maka para pemimpin Kabupaten Ponorogo telah menunjukkan sikap patriotismenya yang didasari oleh semangat cinta tanah air.

## **PENUTUP**

Wawasan mengenai sikap patriotisme para pejuang yang berasal dari masyarakat Ponorogo seharusnya disosialisasikan kepada seluruh warga Ponorogo khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Generasi masa sekarang dan generasi penerus yang akan datang wajib meneladani patriotisme para pendahulunya sehingga kecintaan mereka kepada tanah airnya senantiasa tumbuh dan tidak pupus agar segala aktivitas keseharian mereka dapat bermanfaat sebesar-besarnya dan membanggakan bagi bangsa dan negaranya. Dengan demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berhasil mencapai cita-cita kemerdekaannya dan meraih kesuksesan dalam meraih tujuan pembangunan nasional yang selanjutnya Indonesia mampu tampil sebagai negara yang unggul, maju, adil, makmur, dan berkedaulatan di berbagai sektor kehidupan.

Di antara langkah untuk menanamkan patriotisme tersebut adalah melalui pendidikan, publikasi buku-buku sejarah perjuangan bangsa Indonesia (baik yang bersifat kedaerahan maupun nasional), dan penulisan informasi kesejarahan di tempat-tempat atau situs-situs yang bernilai historis agar perjuangan para pendahulu atau leluhur bangsa yang rela berkorban demi kecintaannya kepada tanah air dapat diteladani dan tidak terlupakan seiring pergantian zaman. Selain itu, pemimpin-pemimpin pemerintahan di pusat dan daerah harus memberikan bukti nyata bahwa mereka benar-benar telah mengedepankan dan mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan tanah airnya daripada kepentingan pribadi, golongan, ataupun bangsa asing.

## **DAFTAR RUJUKAN**

Abdurahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.

- Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium*. Jakarta: Gramedia, 1999.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang, 1997.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Poesponegoro, Marwati Djoned dan Nugroho Notosusanto (ed.). *Sejarah Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Purwowijoyo. *Babad Ponorogo*. Ponorogo: Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 1985.
- Ricklefs, M. C. *Sejarah Indonesia Modern*, terj. Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Sjamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2007.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah*. Bandung: Salamadani, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005.